

BAB I

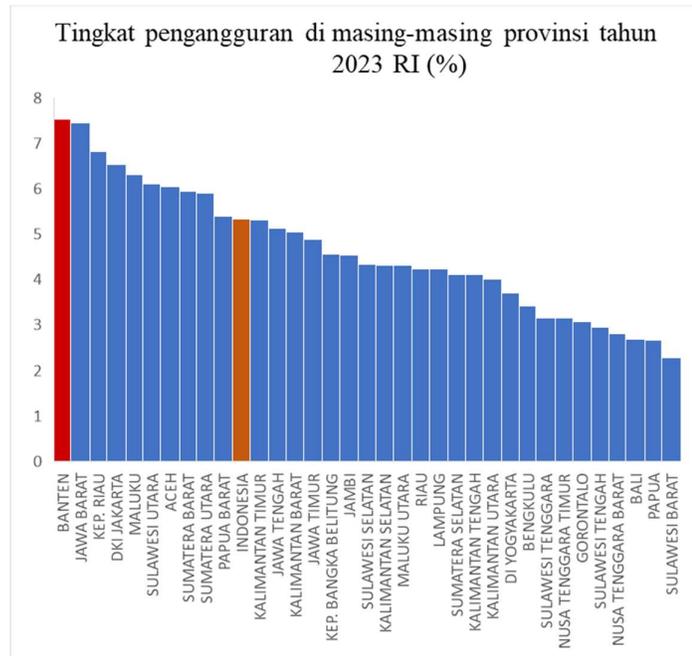
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran tetap menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pemerataan pembangunan antar wilayah (Selviran & Andrian, 2024). Tingkat pengangguran masih menjadi alat ukur yang umum digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perekonomian suatu negara mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia dan menyediakan penghidupan yang layak bagi warganya (BPS, 2023).

Pengangguran juga menyebabkan dampak berkelanjutan terhadap permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan peningkatan kriminalitas, yang akhirnya memperlemah stabilitas sosial sebuah negara (Kemnaker, 2023). Di Indonesia, pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pondasi ekonomi nasional (Kemenkeu, 2023).

Tingkat pengangguran di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Faktor seperti ketersediaan infrastruktur, akses pendidikan, serta struktur ekonomi daerah menjadi penentu utama dalam kemampuan setiap wilayah menyerap tenaga kerja secara optimal. Wilayah yang memiliki sektor unggulan yang mapan, seperti pariwisata atau pertanian modern, umumnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor tradisional (BPS, 2023).



Sumber : BPS, data diolah (2023)

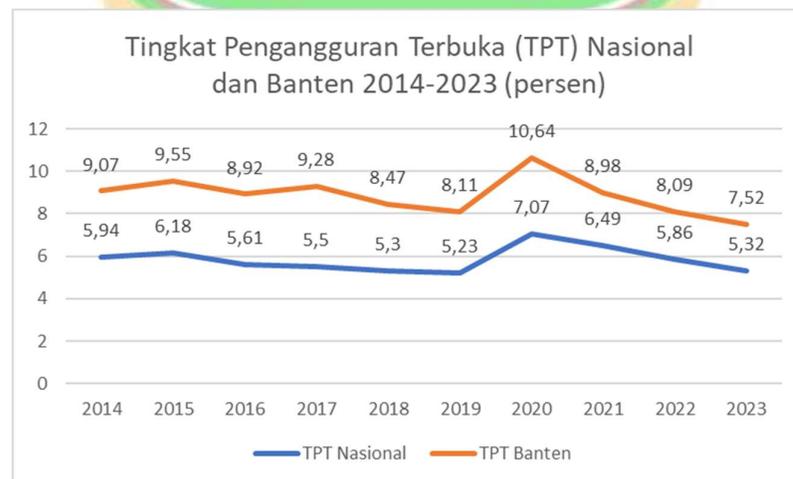
Gambar 1. 1 Tingkat pengangguran di masing-masing provinsi di Indonesia dan rata-rata Indonesia tahun 2023

Salah satu provinsi yang menarik perhatian dalam pembahasan pengangguran adalah Banten. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dengan keberadaan Kawasan industri strategis seperti di Cilegon, Tangerang, dan Serang, yang menjadikan Banten salah satu pusat industri nasional. Kawasan-kawasan tersebut menjadi basis industri manufaktur, petrokimia, dan baja, yang secara teori memiliki kapasitas besar untuk menyerap tenaga kerja. Secara teori, industri-industri padat karya seperti manufaktur dan petrokimia cenderung menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar karena membutuhkan tenaga kerja di berbagai level, mulai dari operasional hingga teknis (Kemenperin, 2023).

Selain itu, keberadaan kawasan industri seperti kawasan industri Cilegon dan kawasan industri modern di Tangerang seharusnya memberikan peluang besar untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan efek multiplier. Efek ini terjadi Ketika aktivitas industri tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja langsung tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung

seperti logistik, transportasi, dan jasa pendukung lainnya (BKPM, 2023). Namun, potensi ini hanya dapat terwujud secara optimal jika tersedia tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, yang seringkali menjadi tantangan di daerah dengan pertumbuhan industri yang pesat (Kemnaker, 2023).

Selain sektor industri, sektor jasa dan perdagangan juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Banten. Namun, ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja industri modern yang lebih teknis dan keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi provinsi ini. Urbanisasi yang cepat di wilayah ini juga meningkatkan tekanan terhadap pasar kerja, karena jumlah angkatan kerja terus bertambah tanpa diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang sepadan. Oleh karena itu, meskipun Banten memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tetap menjadi perhatian utama dalam mengatasi persoalan pengangguran di wilayah ini. Ketidakseimbangan antara kebutuhan industri yang berkembang pesat dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil menciptakan kesenjangan yang mempersulit optimalisasi potensi ekonomi di Banten (Kemnaker, 2023).



Sumber : BPS, data diolah (2023)

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Banten dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional tahun 2014-2023

Disisi lain, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Banten terus menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Banten selalu terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT nasional pada tahun 2014-2023. Angka ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja lokal di provinsi tersebut, meskipun sektor industri di Banten memiliki potensi besar untuk menyerap angkatan kerja. Sektor industri di Banten didominasi oleh industri pengolahan, yang menyerap sekitar 20,80 persen dari total pekerja di provinsi ini. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga merupakan penyerap tenaga kerja yang signifikan (Kemenkeu, 2020). Namun, penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri masih terbatas, yang dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern (Hidayat, 2022). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan industri yang terus berkembang dengan kapasitas sumber daya manusia lokal yang belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar kerja.

Banyak sektor industri di Banten, seperti petrokimia, manufaktur, dan otomotif, membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang tinggi. Namun, berdasarkan penelitian oleh Wulandari et al. (2022), sebagian besar tenaga kerja di Banten masih mengandalkan keterampilan dasar atau tidak memiliki spesialisasi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan industri. Oleh karena itu, meskipun sektor industri berkembang, ketidaksesuaian keterampilan ini menjadi penghambat bagi penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal. Penelitian tersebut menekankan perlunya peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern agar pengangguran di sektor industri dapat ditekan.

Meskipun Provinsi Banten mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 hingga 2023, pengangguran tetap menjadi masalah yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara tingkat keterampilan tenaga kerja lokal dan kebutuhan pasar industri yang terus berkembang. Dalam hal ini, meskipun sektor industri Banten mengalami perkembangan yang pesat, rendahnya penyerapan tenaga kerja masih terjadi

karena keterampilan yang ada tidak sejalan dengan teknologi dan kebutuhan industri saat ini (BPS, 2023).

Hukum Okun, yang menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Hukum Okun menyatakan bahwa setiap 1% penurunan dalam tingkat pengangguran biasanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, namun dalam kasus Banten, meskipun pertumbuhan ekonomi berfluktuasi, penurunan tingkat pengangguran tidak terjadi secara signifikan (Okun, 1962). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi positif, faktor-faktor seperti kualitas pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat menghambat penurunan pengangguran secara efektif (Krugman, 2019).

Sehingga, meskipun sektor industri di Banten memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, ketidaksesuaian keterampilan, serta kurangnya program pelatihan yang tepat, menjadi penghalang dalam penurunan angka pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat hubungan antara pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan pasar industri agar sektor-sektor yang berkembang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal secara optimal (Januarti, 2021).

Selain itu, upah minimum di Provinsi Banten juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2014-2023. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa UMP Banten meningkat dari Rp1,3 juta pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp2,6 juta pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam standar hidup tenaga kerja. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Namun, peningkatan upah ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Penelitian oleh Aryani (2021) menyatakan bahwa meskipun upah minimum mengalami peningkatan, banyak sektor industri lebih memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau menggantikannya dengan teknologi yang

lebih efisien, terutama untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran, meskipun upah menjadi lebih kompetitif. Dalam konteks ini, pendekatan teori Keynesian dapat memberikan perspektif yang relevan untuk memahami dan mengatasi tantangan tersebut.

Menurut teori Keynesian, peningkatan upah minimum dapat mendorong konsumsi domestik melalui peningkatan daya beli tenaga kerja. Ketika pekerja memiliki pendapatan lebih tinggi, mereka cenderung meningkatkan pengeluaran untuk barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efek ini hanya dapat tercapai jika peningkatan upah disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan kebijakan lain yang mendukung daya saing sektor industri.

Dalam pendekatan Keynesian, pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan inklusif. Peningkatan upah minimum harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong investasi di sektor padat karya, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu beradaptasi dengan perubahan biaya produksi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan belanja publik untuk menciptakan peluang kerja baru, seperti melalui pembangunan infrastruktur atau program pelatihan yang difokuskan pada kebutuhan industri lokal.

Dengan demikian, meskipun peningkatan upah minimum di Banten telah memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap pengangguran dapat diminimalkan jika diiringi dengan kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Keynesian. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif tetapi juga memastikan bahwa kebijakan peningkatan upah memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif

juga harus beriringan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tingkat pendidikan di Banten juga mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data BPS (2023), tingkat partisipasi pendidikan menengah dan tinggi di Banten meningkat pesat selama periode 2014-2023. Pemerintah melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan revitalisasi pendidikan vokasi berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mencetak tenaga kerja yang terampil. Kemajuan ini menunjukkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai salah satu elemen kunci pembangunan.

Namun, meskipun ada peningkatan jumlah lulusan dengan pendidikan menengah dan tinggi, penelitian oleh Hadi et al. (2021) menunjukkan bahwa banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh sektor industri, seperti keterampilan teknis dan penguasaan teknologi. Hal ini mencerminkan adanya gap antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang dapat memperburuk masalah pengangguran, terutama di kalangan angkatan kerja muda.

Dari perspektif teori human capital, pengembangan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu merupakan aset berharga yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks Banten, peningkatan upah minimum dan program pendidikan yang telah dilakukan harus didukung oleh inisiatif yang lebih terarah untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Langkah-langkah seperti penguatan kerjasama antara institusi pendidikan dan sektor industri, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta peningkatan akses terhadap pelatihan berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, selain meningkatkan tingkat pendidikan, pemerintah juga perlu fokus pada pengembangan soft skills dan

hard skills yang relevan agar tenaga kerja Banten tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan global.

Kombinasi kebijakan upah minimum yang progresif, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan industri akan menciptakan sinergi yang mampu menurunkan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan pengangguran tetap menjadi isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat pengangguran yang tinggi. Meskipun beberapa variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, upah minimum dan tingkat pendidikan dilihat dari 10 tahun terakhir di tahun 2014-2023 yang mengalami peningkatan, tingkat pengangguran di Provinsi Banten masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, studi ini dilaksanakan guna melaksanakan analisis secara mendalam bagaimana variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh tingkat pengangguran, sehingga hasilnya besar harapan bisa menyampaikan kontribusi bagi pemerintah serta pihak lain pada merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran yang berkepanjangan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang selalu terjadi di banyak negara berkembang adalah pengangguran, termasuk Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Kemakmuran penduduk dan keberhasilan pembangunan perekonomian daerah tercermin dari besarnya angka pengangguran di wilayah tersebut. Besarnya angka pengangguran di Provinsi Banten dinilai masih tinggi, tingginya angka pengangguran menjadi penghambat perekonomian di Provinsi Banten sendiri. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dengan demikian penulis menyusun rumusan masalah yang akan dianalisis di studi ini, diantaranya:

1. Bagaimana Upah Minimum berpengaruh pada tingkatan pengangguran di Kabupaten dan kota Provinsi Banten?
2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada tingkatan pengangguran di Kabupaten dan kota Provinsi Banten?
3. Bagaimana Tingkat Pendidikan berpengaruh pada tingkatan pengangguran di Kabupaten serta kota Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Semua penelitian wajib mempunyai tujuan yang terdefinisi dengan jelas sebagai panduan dalam penyusunan proposal. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran di kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
2. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwasannya temuan penelitian ini akan mempunyai manfaat teoritis serta praktis, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memajukan pemahaman ilmiah serta menjadi sumber bermanfaat bagi akademisi lain yang tertarik pada subjek penelitian khususnya pada pengangguran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah : Studi ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti program pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja, atau insentif bagi pengusaha.

- b. Bagi Akademisi : Untuk peneliti berikutnya, penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan atau panduan mengenai masalah dari pengangguran.
- c. Bagi Masyarakat : Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang apa saja yang menjadi penyebab pengangguran serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasinya.
- d. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam terkait isu pengangguran, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

